

## Hubungan Agama dan Negara dalam Pemikiran Politik Islam

Oleh: Mub. Syamsuddin \*

### Abstract

*The debate over the relationship between religion and the state is never finished, from ancient times until the reform era. The first group states that the relationship between religion and state is a unity that can not be separated. In contrast, other groups who claim that religion and state is a distinct and separate both concept and implementation. The debate over the relationship between religion and the state certainly has implications for the constitutional system in a country, as well as the impact on law enforcement to do with actual problems such as the issue of the establishment of an Islamic state or secular. In Indonesia, the relationship between religion and the state is experiencing ups and downs. There is a harmonious relationship in the future and there is a period where the relationship under strain. One of the most heartbreaking tension is the new order of the days. Where new order with all its power to the people trying to internalize Pancasila accompanied by violent means and state terror. Therefore, in this paper the analysis of Islamic political thought will try to find common ground between religion and state relations both in the past to the present.*

Key words: religion, the state and political Islam.

### Abstrak

*Perdebatan mengenai hubungan agama dan negara tidak pernah selesai, dari zaman dahulu hingga era reformasi ini. Golongan pertama menyatakan bahwa hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebaliknya, golongan yang lainnya menyatakan bahwa agama dan negara merupakan suatu yang berbeda dan terpisah baik konsep maupun implementasinya. Perdebatan hubungan agama dan negara tentu berimplikasi terhadap sistem ketatanegaraan dalam sebuah negara, serta berdampak kepada penegakan hukum kaitannya dengan problem-problem actual misalnya isu negara Islam atau kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di Indonesia, hubungan agama dan negara sebenarnya mengalami pasang surut. Ada di masa hubungan bersifat harmonis dan ada masa dimana hubungan mengalami ketegangan. Salah satu ketegangan yang paling memilukan adalah di masa Orde Baru. Dimana dengan segala kekuasaannya Orde Baru berupaya menginternalisasikan Pancasila kepada masyarakat diiringi dengan cara-cara kekerasan dan teror negara. Oleh karena itu, dalam tulisan ini analisis dengan pemikiran politik Islam akan berusaha menemukan titik temu antara hubungan agama dan negara baik pada masa lalu hingga sekarang.*

---

\* Peneliti Pada Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. E-mail: [imnmi@ymail.com](mailto:imnmi@ymail.com)

Kata kunci: agama, negara, politik Islam.

## A. Pendahuluan

Hubungan antara agama dan negara atau antara politik dan agama, sudah lama menjadi perbincangan para sarjana, baik dari kalangan yang berpegang teguh pada agama maupun dari kalangan yang berpandangan sekuler. Bagi umat Islam, munculnya topik perbincangan tersebut merupakan hal yang wajar, menganggap risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang penuh dengan ajaran dan undang-undang yang bertujuan untuk membangun manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>1</sup> Namun politik Islam tidak bisa lepas dari agama yang merupakan nilai dan intinya. Sebagai contoh Islam dapat dipahami sebagai fenomena religius, kultural dan politik.

Dasar-dasar semua aliran politik dalam Islam yang berkembang selalu berkaitan dengan agama maupun jauh meninggalkan agama karena faktor-faktor di luar dasar-dasar agama itu sendiri.<sup>2</sup> Ia adalah suatu kumpulan fakta yang wajib diwujudkan menjadi kenyataan oleh para pemeluknya, dan ia juga adalah metode untuk mewujudkannya. Prinsip-prinsip metode tersebut adalah sudah termuat secara garis besar di dalam al-Qur'an.<sup>3</sup> Islam sebagai instrumen politik, Islam bukan sekedar tatanan religius melainkan sebuah cara hidup yang sempurna bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, Islam menekankan terwujudnya keselarasan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Menurut Muhammad Abduh kaum Muslim tidak perlu risih dengan penegasannya bahwa Islam memadukan dunia dan akhirat. Islam adalah agama umum dan syari'at yang komprehensif. Oleh karenanya Islam mengandung ajaran yang integratif antara tauhid, ibadah, syariah, akhlaq dan moral serta prinsip-prinsip umum tentang kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Nurcholish Madjid, "Kata Sambutan dalam Munawir Sjadzali Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran", (Jakarta: UI Press, 1990), p. V. Lihat juga: Aini Linjakumpu, *Political Islam in the Global World* (Ithaca Press, 2008), p. 6. Lihat juga Tareq Y. Ismael dan Ismael dan Jacqueline Ismael (eds) "Politik Heritage of Islam ", In Tareq Y. Ismael and Jacqueline Ismael (eds) *Politics and Government in the Middle East and North Africa*, (Miami: Florida International University Press, 1991), p 44.

<sup>2</sup> M. Abu Zahrah, *Sejarah Aliran-aliran dalam Islam Bidang Politik dan Aqidah*, (Ponorogo: Trimurti, 1991), p 45.

<sup>3</sup> Ja'far Idris, *Islam dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Mizan, 1984), p. 30-31.

<sup>4</sup> Aini Linjakumpu, *Political Islam in the Global* (Ithaca Press, 2008), p. 8.

<sup>5</sup> J. Suyuthi, Fiqih Siyasah, *Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), p. xi. dan lihat Muhammad Abduh, Ivonne Haddad, *Perintis Pembaruan Islam dalam Ali Rahnama (ed), Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1996), p. 62. dan lihat

Dalam Islam tidak dikenal pemisahan (*deferensiasi*) antara yang profan dan yang sakral (politik dan agama) seperti agama Kristen. Sementara dalam Islam berlaku penyatuan agama dan negara. Sebaliknya Islam memandang bahwa politik merupakan tugas keagamaan dan keduniawian sekaligus yang dilaksanakan secara sistematis.<sup>6</sup> Pada dasarnya, gereja dan negara itu bertentangan, dengan batas pertentangan antara yang profan dan yang sakral. Setidak-tidaknya, inilah pernyataan yang diulang-ulang untuk membedakan kedua agama tersebut. Oleh karena itu, politik merupakan aktivitas konkret manusia dalam kehidupannya di dunia, tidak dipahami hanya sekedar pemenuhan tugas keduniawian yang lebih banyak mengejar kepentingan-kepentingan pragmatis dengan orientasi yang bersifat jangka pendek. Praktik diberi muatan keagamaan, yaitu nilai-nilai dan moralitas keagamaan sehingga politik menemukan kenyataan hakikinya sebagai refleksi tanggungjawab (amanah) manusia, baik secara kemanusiaan maupun secara ketuhanan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, Islam dipandang berbeda dengan banyak agama lain, sebagaimana diungkapkan oleh Joachim Wach bahwa pada agama Islam, pertentangan dibanding dengan yang ada antara gereja dan negara dalam agama Kristen zaman tengah tidak bisa timbul, karena dalam Islam tidak pernah ada hal yang semacam beda keagamaan (*ecclesiastical body*) apalagi konstitusi keagamaan hirarkhis.<sup>8</sup> Secara stereotipikal, Marshall Hodgson melihat keseluruhan sejarah Islam sebagai *venture* atau usaha tidak kenal berhenti untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan dan *venture* itu melibatkan orang-orang Muslim dalam praktik semua bidang kegiatan hidup, termasuk politik. Pelibatan dalam bidang politik, oleh Huston Smith dilihat sebagai perwujudan dari energi atau kekuatan yang diperoleh umat Islam, karena mereka tunduk dan patuh kepada Tuhan.<sup>9</sup> Dengan kata lain, tenaga pendorong untuk menggarap persoalan-

---

pula Yusuf Qardhawiy, *Fiqih Negara*, Penerjemah Safril Halim (Jakarta: Rabboni Press, 1977) p. 11.

<sup>6</sup> L. Carl Brown, *Wajah Islam Politik Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Umat*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003)., dan lihat Anjar Nugroho, "Politik Islam Perspektif Sekularisme: Studi Kritis Pemikiran Ali Abd Al- Raziq", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 39, No. 11, Th. 2005, p. 280, dan lihat pula Kalim Siddiqui, *Seruan-seruan Islam: Tanggung Jawab Sosial dan Kenajiban Menegakan Syari'at* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), p. 119.

<sup>7</sup> Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam dan Pluralisme Budaya dan Politik (Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan)* (Yogyakarta: Sippres, 1994), p. 42.

<sup>8</sup> Nurcholish Madjid, Kata Pengantar dalam Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1987), p ix., dan Lihat Joachim Wach, *The Comparative Study of Religion*, ed, Joseph M. Kitagawa, (New York and London: Columbia University Press, 1966), p. 4.

<sup>9</sup> Nurcholish Madjid, Kata Sambutan dalam Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran , Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), p. vi.

persoalan duniawi dengan kesungguhan luar biasa didukung oleh kepasrahan total mereka kepada kehendak Ilahi.

Di antara agama yang ada di dunia ini, barangkali hanya Islam yang memiliki hubungan erat dengan politik yang menunjukkan salah satu dari karakteristik perkembangan dalam sejarah. Menurut Muhammad Asad<sup>10</sup>, ia menegaskan bahwa, mustahil bagi kita untuk memperoleh penilaian yang tepat tentang Islam tanpa mencurahkan perhatian yang sepenuhnya kepada politik. Pernyataan Asad ini, semakin menemukan pembenarannya bila ditarik ke sejarah masa hidup Nabi di Madinah. Pola hubungan komunitas Muslim dan komunitas non Muslim yang diwujudkan oleh Nabi dalam bentuk konstitusi atau disebut Piagam Madinah merupakan contoh kongkrit untuk tidak berlebihan menggarapnya sebagai modal keterkaitan Islam dengan politik.

Dalam hal ini, sejumlah persyaratan pokok tumbuhnya kehidupan masyarakat madani yang dikembangkan Nabi Muhammad SAW adalah prinsip kesamaan, egaliter, keadilan, dan partisipasi.<sup>11</sup> Oleh karenanya, Bernard Lewis<sup>12</sup> mengatakan bahwa, Islam sejak masa hidup pendirinya adalah sebuah negara, dan pertalian antara negara dan agama tertancap tanpa dapat terhapuskan dalam ingatan dan kesadaran pengikut setianya di dalam kitab suci, sejarah dan pengalamannya. Sejumlah pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana hubungan agama dan negara dalam pemikiran politik Islam. Di dalam tulisan ini penulis akan memaparkan hubungan agama dan negara dalam pemikiran politik Islam baik pada masa lalu hingga sekarang.

## **B. Hubungan antara Islam dan Politik**

Politik tidak lahir di masa Nabi Muhammad SAW, karena sejak pertama kali manusia saling berinteraksi dan mengangkat pemimpin diantara mereka, itu artinya politik sudah ada. Namun karakter dunia politik yang terjadi di masa sebelum dan semasa Nabi Muhammad itu penuh dengan kelicikan dan kebusukan. Walau begitu, semua aktivitas tersebut tetaplah bernama politik, karena memang makna utama politik adalah pengelolaan urusan manusia; sedangkan baik atau buruknya pengelolaan itu urusan lain. Perbedaan utama antara politik umum (*as-siyasah al-'ammah*) dengan politik (*Islam as-siyasah as-syar'iyah*) itu adalah pada standar syari'at Islam. Sejak awal dakwahnya, Nabi Muhammad

---

<sup>10</sup> Muhammad Asad, *Pemerintahan dan Azas-azasnya, dalam Salim Azqam (ed), Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 1983), p. 70.

<sup>11</sup> Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*, (Yogyakarta: Galang Press 2001), p. 81

<sup>12</sup> Bernard Lewis, *Kebangkitan Islam di Mata Seorang Sarjana Barat*, (Bandung: Mizan, 1983), p. 50., dan lihat Akram Dhiyauddin Umari, *Masyarakat Madani Tinjauan Historis Kehidupan Nabi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), p. 77-78.

sangat intens mengajarkan prinsip-prinsip politik, khususnya setelah hijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad membangun ulang konsep politik yang selama ini tersebar di umat-umat lain. Membangunnya dengan sentuhan Islam yang lebih manusiawi, bernilai dan rasional.<sup>13</sup>

Dalam sejarah pemikiran politik, tak terkecuali pemikiran politik Islam, pencarian konsep tentang negara merupakan salah satu isu yang menjadi pusat perhatian para pemikir dan filsuf sejak masa klasik hingga masa modern dalam proses penemuan mereka terhadap bentuk ideal masyarakat manusia. Dalam dinamika berikutnya, pemikiran politik Islam tidak hanya merespons intervensi eksternal, yang selama ini dituduh sebagai sumber malapetaka di dunia Islam. Kekuatan eksternal juga telah memapankan eksistensinya di dunia Islam dengan membentuk seperangkat sistem kemasyarakatan yang cukup kokoh dalam menyebarkan pengaruhnya. Sepintas, banyak orang yang berpendapat bahwa persoalan hubungan agama dan negara merupakan sesuatu yang sudah selesai. Namun, jika diamati secara lebih dalam, hal itu masih merupakan suatu persoalan.<sup>14</sup>

Secara umum, ada dua kekuatan yang menjadi sumber pokok dari sosial kontrol, yaitu agama dan politik. Seringkali keduanya berfungsi secara integral di dalam masyarakat, inilah yang seringkali disebut sebagai *religiopolitical system*. Komponen ideologi dalam sistem ini terdapat dalam setiap agama. Dalam konteks ini ideologi politik sekuler tidak eksis, dan legitimasi pemerintah didasarkan pada ide-ide agama. *Religiopolitical system* merupakan sistem yang terintegrasi dimana pemerintah, ulama, ideologi agama, norma agama, dan kekuatan memaksa dari pemerintah dikombinasikan dalam rangka memaksimalkan stabilitas masyarakat.

Dalam konteks politik, domain Islam dibagi menjadi dua. Pertama, domain yang sudah ada teks syar'i. Domain politik yang mempunyai teks syar'i inilah yang termasuk *tsawabit*, yaitu dalil-dalil yang pasti (*qath'i*). Referensi dalil-dalil yang *tsawabit* adalah teks-teks yang ada dari al-Qur'an, sunnah dan ijma umat Islam sehingga semua yang ada dalam ketiga hal tersebut menjadi sebuah ilmu yang wajib diamalkan dan teori yang harus dipraktikkan.<sup>15</sup> Di dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr Ayat 7

---

<sup>13</sup> Muhammad Elvandi, *Inilah Politikku*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), p. 7-8.

<sup>14</sup> Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), p 158, lihat Khadiq, *Gerakan Politik Umat Islam Indonesia di Daerah: Revolusi, Orde Lama, dan Orde Baru, dalam M. Damami Zein (editor) Wacana Politik Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2007), p. 5-6

<sup>15</sup> Lihat Muhammad El-Fandi, *Inilah Politikku*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), p. 204.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Ayat di atas menegaskan referensi Islam secara umum, termasuk politik Islam pada khususnya. Kedua sumber itulah yang memberikan penjelasan tentang asas politik Islam dan prinsip-prinsip globalnya. Atau seperti dijelaskan dalam teks sunnah tentang cara mengambil kebijakan politik, bahwa Abu Bakar dalam kebijakan politiknya, jika ia menemukan sebuah konflik, ia akan meninjaunya dari referensi kitabullah, jika ia mendapatkannya maka ia akan menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi jika tidak menemukannya dalam kitabullah maka ia mencari tahu dari sunnah Rasulullah SAW.<sup>16</sup>

Sebagai sebuah institusi politik, negara bukanlah sebuah entitas yang bisa merasakan, mempercayai, atau menindak. Manusia yang selalu bertindak atas nama negara, menggunakan kekuasaan atau menjalankannya melalui organ-organnya. Oleh karena itu, negara itu pada hakikatnya rakyat atau bangsa itu sendiri. Jadi kapan pun manusia membuat keputusan tentang persoalan kebijakan, mengusulkan, atau membuat rancang undang-undang yang dianggap mewujudkan prinsip-prinsip Islam<sup>17</sup>. Mereka percaya bahwa agama tak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan politik, karena agama memberitahukan setiap tindakan yang diambil seseorang, dan al-Qur'an memberikan banyak bagian yang menekankan hubungan agama dan negara serta masyarakat.<sup>18</sup>

Dari persoalan itulah muncul pemikiran politik Islam, yang lebih spesifik yang lahir dari gerakan-gerakan sosial (*harakah Islamiyah*) yang berusaha melakukan kritik terhadap rezim pro Barat.<sup>19</sup> Secara ideal Islam tidak membedakan agama dan negara karena masyarakat Islam yang sebenarnya dibentuk dan dipimpin oleh Nabi Muhammad sendiri di masa sepuluh tahun terakhir masa hayatnya, menuntut komitmen baik keagamaan maupun politis dari para anggotanya. Pesan yang didakwahkan

<sup>16</sup> Ibid., p. 204-205 dan lihat pula Tim Tarjih Departemen Agama dan UII, al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X Juz 28-29-30 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 1991), p. 60-61

<sup>17</sup> Abdullahi Ahmed An-Naim, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syaria* (Bandung: Mizan, 2007), p. 28, lihat Muhammad Al-Bahy, *Islam dan Sekularisme Antara Cita dan Kenyataan*, (Solo: Ramadhani, 1998), p. 19.

<sup>18</sup> John L. Esposito, *Islam Aktual*, (Depok : Inisiasi Press, 2005), p. 164.

<sup>19</sup> Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2001), p. 24.

oleh Nabi Muhammad bukanlah sesuatu yang bersifat abstrak melainkan sesuatu yang langsung berhubungan dengan keadaan atau persoalan kehidupan personal dan sosial.<sup>20</sup>

Dalam hal ini, agama menjaga politik dengan memberikan legitimasi kepada negara, partai, dan perorangan. Legitimasi kepada negara sudah lama dilakukan oleh Islam. Pada dasarnya, bagi pemikir politik Islam, menurut Din Syamsuddin<sup>21</sup>, pencarian konsep tentang negara sebagaimana disebutkan di atas, mengandung dua maksud. *Pertama*, upaya menemukan idealitas Islam tentang negara dengan menekankan aspek teoritis dan formal, yaitu mencoba menjawab pertanyaan, "bagaimana bentuk negara dalam Islam". Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara. *Kedua*, upaya melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara dengan menekankan aspek praksis dan substansial, yaitu mencoba menjawab pertanyaan, "bagaimana isi negara menurut Islam". Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara, tetapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika dan moral.<sup>22</sup> Bentuk negara yang ada pada suatu masyarakat Muslim dapat diterima sejauh tidak menyimpang dari nilai dasar tadi. Kendati kedua maksud di atas pendekatannya berbeda, namun keduanya mempunyai tujuan yang sama yakni menemukan rekonsiliasi antara realitas agama dan realitas politik.

Rekonsiliasi inilah, antara cita-cita agama dan realitas politik menjadi pemikiran utama para pakar politik Islam. Solusi yang ditawarkan, baik pada masa klasik maupun masa modern terhadap hal ini sangat beragam, seiring dengan keragaman *setting* sosio-kultural dan politik yang mereka hadapi, seperti tuntutan zaman, sejarah, latar budaya, tingkat perkembangan peradaban dan pengaruh peradaban asing. Dalam hal ini, baik faktor intern maupun faktor ekstern sama-sama mempunyai andil dalam menentukan keragaman tersebut atau dengan kata lain selalu terdapat tarik-menarik antara ketentuan-ketentuan normatif (ajaran Islam) dalam realitas sosial politik dan historis.

---

<sup>20</sup> John Obert Voll, *Politik Islam Kelangsungan dan di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), p. 39.

<sup>21</sup> M. Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam*, (Ulumul Quran, No.2, Vol.IV, Tahun 1993), p. 4.

<sup>22</sup> Ali Abd Al-Raziq, *al Islam wa Ushul-ul Hukum*, (Kairo: 1925), p. 24, menurut M. Dhiauddin Rais dalam bukunya *Teori Politik Islam* (2001), ia menyebutkan bahwa buku *Al-Islam wa Usul-ul Hukum* karya Ali Abd Al-Raziq itu bukanlah sebuah kajian ilmiah yang murni, namun merupakan sebuah bentuk kampanye politik yang dilakukan oleh beberapa negara kolonialis untuk menyerang eksistensi kekhalifahan Usmaniyah pada saat Perang Dunia I Romawi karena Khalifah yang ditaati oleh kaum muslimin saat itulah mengumumkan kewajiban berjihad melawan negara itu, yaitu Inggris.

Sistem politik di dunia Islam pada zaman modern banyak terpengaruh oleh sistem politik Barat. Contoh yang jelas adalah mengenai "kedaulatan rakyat". Banyak pihak intelektual yang menuntut bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan satu-satunya dalam negara adalah rakyat merupakan faktor menentukan dalam pembentukan instansi negara. Begitu juga dalam bidang legislasi, dan malah ada sementara pihak yang menginginkan kedaulatan rakyat penuh dalam pemerintahan Islam.<sup>23</sup> Islam merupakan sistem yang berdiri sendiri, mandiri dalam konsep dan sarana yang dipergunakannya, bahwa Islam tumbuh sendiri dan menempuh jalannya sendiri<sup>24</sup> Dengan demikian, maka tujuan paling mendasar dari pemerintahan Islam ialah menyediakan suatu kerangka dasar politik bagi persatuan dan kerjasama umat Islam.<sup>25</sup> Dengan demikian, suatu sistem dapat menyandang dua karakter itu sekaligus karena hakikat Islam yang sempurna menerangkan urusan-urusan materi dan rohani, dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat.

Pada pertengahan abad ke-20, sebagian besar dunia Islam telah mencapai kemerdekaan politik. Pengaruh dan daya pikat Barat yang terus menerus merupakan bukti lebih sekulernya jalan yang dipilih oleh kebanyakan pemerintah dan kaum elit modern. Bahkan di negara-negara dimana Islam mempunyai peran penting dalam gerakan-gerakan nasionalis, generasi baru yang berkuasa cenderung berorientasi lebih sekuler. Jika seseorang memandang dunia Islam, maka ada tiga arah atau model dalam hubungan antara agama dengan negara yaitu, Islam, sekuler, Muslim, dan di sini Saudi Arabia memproklamasikan diri sebagai negara Islam. Monarki istana Saud mendasarkan legitimasinya pada Islam, menyatakan diri diatur dan memerintah dengan al-Qur'an dan hukum Islam. Istana Saud telah membangun hubungan yang erat dengan para ulama, yang terus menerus menikmati posisi istimewa sebagai penasihat pemerintah dan pejabat dalam sistem hukum dan pendidikan. Pemerintah Saudi menggunakan Islam untuk melegitimasi politik dalam negeri maupun luar negeri.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Rifyal Ka'bah, *Islam dan Fundamentalisme*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), p. 121.

<sup>24</sup> Lihat James P. Piscatori, "Politik Ideologis di Arab Saudi" dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (Penyunting perkembangan) *Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), p. 196-197.

<sup>25</sup> Salim Azzam, *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 1983), p. 73, dan lihat M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), p. 4, dan lihat pula Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, (Jakarta: Gramedia, 1994), p. 39.

<sup>26</sup> Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1984), p. 134.



Sebagai contoh, Turki, satu-satunya peninggalan Kerajaan Usmaniyah yang ada, telah memilih negara sekuler yang membatasi agama hanya untuk kehidupan pribadi. Turki, di bawah kepemimpinan Kemal Attaturk (sebagai Presiden, 1923-1938), melakukan proses Turkinisasi dan westernisasi yang komprehensif, dan juga sekularisasi yang mengubah bahasa dan sejarah serta agama dan politik. Buku-buku berbahasa Inggris menggantikan yang berbahasa Arab, dan sejarah ditulis ulang, dengan menekan komponen-komponen Arabnya dan mengagungkan peninggalan Turkiya. Attaturk secara otokratis mengawasi sederetan pembaruan yang mencampakkan sultan, menghapuskan kekhalifahan, menjatuhkan Islam, menutup pondok-pondok, melarang penggunaan jubah, dan menggantikan lembaga-lembaga tradisional (hukum, pendidikan, pemerintahan) dengan yang modern, suatu pilihan yang diilhami oleh Barat.<sup>27</sup>

Sebagaimana dijelaskan Esposito dan Brown di atas, sebagian besar negara di dunia Islam mengambil posisi tengah. Mereka adalah negara Muslim dalam arti bahwa mayoritas penduduk dan peninggalannya adalah Muslim, namun mereka mengikuti jalan pembangunan sekuler. Sebagian melihat ke Barat untuk mencari basis bagi sistem pemerintahan konstitusional, hukum dan pendidikan modern. Sementara itu mereka yang memasukkan peraturan Islam ke dalam undang-undang mereka, yang menuntut agar kepala negara adalah orang yang beragama Islam dan hukum Islam harus diakui sebagai sumber hukum (walaupun hal ini tidak dijalankan dalam kenyataannya).

Pemerintahan-pemerintahan ini berusaha mengontrol agama dengan cara membangun lembaga-lembaga keagamaan dalam birokrasi mereka, dalam kementerian hukum, pendidikan dan urusan keagamaan. Dengan beberapa pengecualian, pada umumnya *trend*, harapan, dan tujuan pemerintahan-pemerintahan kaum elite modern yang berpendidikan Barat adalah untuk menciptakan negara modern dengan paradigma Barat sebagai modelnya. Peraturan negara tersebut memaksakan pengaruhnya baik terhadap individu maupun kelompok, dan pada kenyataannya setiap individu membentuk kediriannya sesuai dengan pola yang telah ditentukan oleh negara.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Jhon I. Esposito, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), p. 90, dan lihat L. Carl Brown, *Wajah Islam Politik Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Umat*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), p. 162-163, dan lihat pula A. Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, (Jakarta: Jambatan, 1994), p. 1-3

<sup>28</sup> Hakim Mohammad Said, *Moralitas Politik: Konsep Mengenai Negara dalam Fathi Osman (ed), Islam Pilihan Peradaban*, (Yogyakarta: Shalahuddin Press), p. 76.

### C. Polarisasi Pemikiran Politik Islam

Bertolak dari paradigma di atas, maka pandangan bahwa agama dan negara adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, diwakili oleh kelompok Syi'ah. Pemerintahan negara, menurutnya diselenggarakan atas dasar *divine sovereignty* (kedaulatan Ilahi), karena kedaulatan hanya milik Allah. Tokoh Revolusi Islam Iran Imam Khomeini, ia mengatakan bahwa "dalam negara Islam wewenang menetapkan hukum berada pada Tuhan". Keberhasilan Khomeini yang paling penting adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan yang mendapat inspirasi kuat dari Islam dimungkinkan untuk menggulingkan suatu Kerajaan yang jelas-jelas pro Barat dan sangat kuat.<sup>29</sup>

Sekalipun revolusi Islam di Iran telah menyedot perhatian dunia, pola revolusi agama yang dijumpai di Mesir dan sedikit banyak di Timur Tengah khususnya lebih mewakili arus besar revolusi-revolusi agama.<sup>30</sup> Dalam pengertian ini tiada seorang pun yang berhak menetapkan hukum, dan yang boleh berlaku hanyalah hukum dari Tuhan. Atas doktrin *imamah* yang dimiliki, imam menurut konsep ini, adalah *kepanjangan tangan Tuhan di dunia*. Oleh karenanya ke-Imaman harus diwujudkan melalui penentuan (*wasiyah*) yang diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad (*ahl al-Bait*)<sup>31</sup>. Dalam hal ini, politik harus berdasarkan legitimasi keagamaan yang hanya dimiliki oleh para keturunan Nabi.

Berseberangan dengan paradigma Sunni yang didasarkan pada pemilihan (*ikhtiyar*) dan pembaiatan (*bay'ah*) seorang kepala negara (*kalifah*), paradigma Syi'ah menekankan wilayah ("kecintaan" dan "pengabdian" kepada Tuhan) dan *ishmah* (kesucian dan dosa) yang hanya dimiliki oleh para keturunan Nabi sebagai yang berhak dan absah menjadi kepala negara (Imam).<sup>32</sup>

Sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan berfungsi menyelenggarakan kedaulatan Tuhan, negara, dalam perspektif Syi'ah bersifat teokratis, yaitu kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan (Syari'ah). Hal ini dapat dikatakan bahwa Islam berpihak sepenuhnya kepada sistem demokrasi, sekalipun dalam menghadapi isu-isu penting tertentu harus berbeda dengan sistem demokrasi yang berkembang di negara-negara non Muslim. Dalam perspektif ini, maka adalah sebuah

<sup>29</sup> R.M. Burrell, "Pendahuluan: Fundamentalisme Islam di Timur Tengah Penelitian Asal-usul dan Keanekaragamannya" dalam R.M.Burrell (ed), *Fundamentalisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), p. 44-45.

<sup>30</sup> Mark Huegensmeyer, *Menentang Negara Sekuler: Kebangkitan Global Nasionalisme Religius*, (Bandung: Mizan, 1989), p. 98.

<sup>31</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Baghdad: Al-Mutsanna, 1967), p. 498.

<sup>32</sup> W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1960), p. 110.

ironi bilamana sampai hari ini negeri-negeri Islam masih saja bingung dalam mencari suatu sistem politik yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan moral Islam.<sup>33</sup>

Konsep penyatuan agama dan negara juga menjadi anutan kelompok "fundamentalis Islam" (*al-Ushuliyah al-Islamiyah*) yang cenderung berorientasi pada nilai-nilai Islam yang dianggapnya mendasar dan prinsipal. Ibnu Taimiyah, inspirator utama gerakan pembaharuan Islam, kemudian dijuluki Barat sebagai "Bapak fundamentalisme Islam pada zaman modern". Penamaan atau cap tersebut merupakan "pemeriksaan besar-besaran" terhadap sejarah. Karena, "gerakan kembali pada al-Qur'an atau Islam yang murni" itu mempunyai visi, cita, dan orientasi yang sama sekali berbeda dengan fundamentalisme Kristen. Salah satu perbedaan itu adalah fundamentalisme Kristen muncul karena ketidakpuasan terhadap agama (yang semakin lemah dan tidak tahan menghadapi arus penemuan dan pengembangan sains modern), sedangkan "gerakan yang sama" dalam Islam muncul justru karena ketidakpuasan terhadap keadaan dunia.<sup>34</sup>

Selain itu, salah seorang di antara pemikir Islam kontemporer yang dipandang sangat vokal menyuarakan konsep ini adalah Abu al-A'la al-Maududi (1903-1979).<sup>35</sup> Dalam konteks politik Islam syiah, konsep pemisahan kekuasaan negara diatur dalam bingkai demokrasi dan konstitusi Republik Islam berdasarkan pola hubungan *imamah* dan *ummah*<sup>36</sup>. *Imamah* adalah representasi kekuasaan Allah, sedangkan *ummah* adalah representasi dari kekuasaan manusia untuk mengatur dirinya sendiri<sup>37</sup> dan tidak terbatas pada seseorang secara individual atau kelompok, dan Allah SWT telah mengkhususkannya kepada Ibrahim, dan menjadikannya diwarisi oleh anak cucunya dan orang-orang pilihan. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Anbiya ayat 73.

---

<sup>33</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Politik dalam Perspektif Islam*, (Ulumul Quran, No.2, Vol. IV, Tahun 1993), p. 107, dan lihat Syahrugh Akhavi, *Pemikiran Sosial Syiah dan Praksisnya dalam Sejarah Iran Akhir-akhir ini dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (Penyunting) dalam Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), p. 162-163.

<sup>34</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Isu-isu Dunia Islam*, (Yogyakarta: Dinamika, 1996), p. 86-87.

<sup>35</sup> Abul 'Ala Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan 1993), p. 64

<sup>36</sup> Lihat Djazimah, Muqaddas, *Kontribusi Versi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), p. 33.

<sup>37</sup> Lihat Djaka Sutapa, *Ummah Komunitas Religius Sosial dan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Duta Wacana University Press, 1991), p. 17-18.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

*Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.*

Menurut pandangan Imam Abu al-A'la al-Maududi terhadap kekuasaan dan kedaulatan Tuhan merupakan landasan fundamental dari sistem sosial dan moral, dan itulah satu-satunya titik sentral dari sistem politik Islam. Akibatnya, tidak seorang pun yang diberikan wewenang untuk membuat, menetapkan atau memberikan aturan-aturan, juga tak seorang pun diperlakukan atau diberi keistimewaan untuk membuat undang-undang. Oleh karena itu, imam ibarat matahari terbit yang memancarkan sinarnya dan ia menerangi cakrawala yang tidak dapat dicapai tangan dan penglihatan.<sup>38</sup>

Berpijak dari konsep di atas, Munawir Sjadzali<sup>39</sup> mengemukakan tiga landasan keyakinan yang menurutnya sangat esensial. Pertama, tidak seorang pun baik individu maupun kelompok mendeklarasikan diri sebagai pemegang kedaulatan. Hanya Allah-lah yang memegang kedaulatan dalam arti hakiki, sementara manusia tidak lain hanya sebagai pelaksana dari kedaulatan Tuhan. Kedua, Allah adalah pembuat hukum dalam arti yang sebenarnya, wewenang untuk menetapkan berlakunya undang-undang, sedang manusia sama sekali tidak diberi wewenang menetapkan dan merubah setiap hukum yang telah digariskan Allah. Ketiga, dalam segala hal, negara ditegaskan atas undang-undang Allah, maka sebagai konsekuensinya dalam pemerintahan Islam harus melaksanakan segala ketentuan Allah. Selanjutnya ia mengatakan bahwa oleh karena di dalam Islam hanya Tuhan saja yang berdaulat, maka Tuhan harus dipandang sebagai satu-satunya perumus undang-undang di dalam sebuah negara Islam.

Dalam pandangan al-Maududi konsep tentang negara Islam harus berdasarkan syari'ah, tetapi dapat dikatakan bersifat teokratis, disini al-Maududi lebih memilih istilah "teo-demokrat" untuk negara idealnya.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Abul 'Ala al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Penerjemah Muhammad al-Bagir (Bandung: Karisma, 2007), p. 57-58. Lihat M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), p. 122-123.

<sup>39</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), p. 166.

<sup>40</sup> M. Din Syamsuddin, *Usaba Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam*, (Ulumul Quran, No.2, Vol.IV, Tahun 1991), p. 3.

Teokrasi dalam Islam merupakan suatu yang sama sekali berbeda dengan tradisi yang pernah berjaya di Eropa, dimana suatu kelompok masyarakat khusus (pendeta) yang melakukan dominasi tidak terhingga dengan menegakkan hukum-hukumnya sendiri atas nama Tuhan, dan pada akhirnya melaksanakan keilahian dan ketuhanan mereka sendiri atas nama rakyat. Sistem pemerintahan yang seperti ini justru bersifat syaitaniyah (*Satanic*) daripada Ilahiyah (*Divine*). Hal ini, sangat bertolak belakang dengan teokrasi yang dibangun oleh Islam dan tidaklah dikuasai oleh kelompok keagamaan manapun kecuali seluruh masyarakat Islam dari segala kelompok.<sup>41</sup>

Pandangan tentang simbiosis agama dan negara atau hubungan timbal balik antara agama dan negara, berdasarkan pada formulasi pemikiran bahwa pada prinsipnya agama memerlukan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Dalam Islam, pergesekan yang erat antara ajarannya politik, terletak pada dua hal, seruan menegakkan "kebenaran" dan realitas umat atau masyarakat sendiri.<sup>42</sup> Pandangan ini dapat ditemukan umpamanya, dalam pemikiran al-Mawardi dalam karyanya *al-Ahkam as-Sultaniyah* (peraturan-peraturan kerajaan/pemerintahan)<sup>43</sup> yang merupakan karya ilmiah pertama tentang ilmu politik dan administrasi negara dalam sejarah Islam,<sup>44</sup> bahkan para orientalis memandangnya sebagai dokumen kunci dalam evolusi pemikiran politik Islam,<sup>45</sup> dan ia menegaskan bahwa Imamah (kepemimpinan) dilembagakan untuk menggantikan kenabian guna melindungi agama dan mengatur dunia.

Apa yang dimaksudkan oleh al-Mawardi dengan imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara, dan dengan demikian al-Mawardi memberikan juga baju agama kepada kepala negara di samping baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah), untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat politik. Dengan demikian, seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama, dan dilain pihak pemimpin politik<sup>46</sup>. Pemeliharaan

---

<sup>41</sup> Fauzi Rahman dan Miftahuddin, *Upaya Al-Maududi Memurnikan Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1993), p. 37-38.

<sup>42</sup> Fachry Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan, Kebaruan Demokrasi dalam Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), p. 129.

<sup>43</sup> Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Mesir: Al-Khalabi, 1973), p. 8, dan lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1978), p. 103.

<sup>44</sup> Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibnu Taimiyah*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1973), p. 19.

<sup>45</sup> P. Little Donald, *A New Look at Ahkam Al-Sultaniyah*, (The Muslim Word, Vol.64, No.1, 1974), p. 1.

<sup>46</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: 1990), p. 63.

agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda namun berhubungan secara simbiotik, dan keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Dalam pandangan Islam, antara fungsi religius dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali.<sup>47</sup>

Sedemikian dekat dan saling bergantung antara agama dan kekuasaan politik (negara), atau berhubungan secara integral antara agama dan politik. Agama adalah dasar kata al-Ghazali, dan Sultan adalah penjabarnya. Dalam *al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Mulk* (batangan logam mulia tentang nasihat untuk raja-raja) al-Ghazali antara lain mengisyaratkan hubungan paralel antara agama dan negara, seperti dicontohkan dalam paralelisme Nabi dan raja. Menurutnya, jika Tuhan telah mengirim Nabi-nabi dan memberi mereka "kekuatan Ilahi". Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu kemaslahatan kehidupan manusia. Paralelisme ini dapat ditafsirkan sebagai simbiosis yang bersifat setara. Hal ini, dilakukan oleh pendapat al-Ghazali dalam *Kimya-yi Sa'adat* bahwa agama dan negara adalah saudara kembar yang lahir dari satu ibu.<sup>48</sup>

Mencermati polarisasi pemikiran politik Islam, akibat munculnya berbagai pandangan tentang hubungan agama dan negara sebagaimana disebutkan di atas, lebih menunjukkan pada tataran metodologi yang digunakan oleh para pemikir politik dalam menafsirkan sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadis). Di dalam pola pemikiran Islam di sepanjang sejarah pergumulannya, dikenal dua kutub pendekatan yang berlawanan satu sama lain, yaitu antara skriptualistik dan rasionalistik antara idealistik dan rasionalistik, kemudian terakhir antara formalistik dan substansivistik. Pendekatan demikian mementingkan perlunya formulasi dan institusionalisasi ajaran agama dalam suatu suprastruktur dan infrastruktur politik, seperti ditunjukkan konsep negara Islam dan partai Islam. Sebaliknya, pendekatan substansivistik lebih mengutamakan isi daripada bentuk atau wadah politik. Persoalan utama pendekatan demikian bukan struktur politik yang ditandai dengan terbentuknya negara formal (Islam), tetapi aspek etik dan moralitas yang diformat melalui ajaran-ajaran agama.<sup>49</sup>

Tipe kecenderungan skriptualistik menampilkan pemahaman yang bersifat tekstual dan literal, yaitu mengandalkan pada penafsiran yang menekankan bahasa. Sementara kecenderungan rasionalistik menampilkan

---

<sup>47</sup>Lihat Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), p 130. dan lihat John L. Esposito, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), p. 38

<sup>48</sup> Al-Ghazali, *Iqtishad fi Al-'Itiqad*, (Mesir: Maktabah, 1972), p. 109.

<sup>49</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Isu-isu Dunia Islam*, (Yogyakarta: Dinamika, 1996), p. 39.

penafsiran rasional dan kontekstual. Perbedaan titik pandang pendekatan ini melahirkan perbedaan paham terhadap konsepsi al-Qur'an mengenai negara, sebagaimana dapat ditemukan dalam ayat al-Qur'an mengenai khalifah.<sup>50</sup> Khalifah adalah figur di dunia yang mendapat pengasahan dari kalangan "ulama", yang merupakan para penjaga syari'ah. Dengan demikian, maka tipe idealistik cenderung melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan nilai-nilai Islam yang ideal, sebagaimana konsepsi negara yang ditawarkan oleh para filsuf seperti Al-Farabi dengan *al-Madinah al-Fadhillah* (Negara Terbaik) di dalamnya ia menguraikan bahwa negara terbaik ialah negara yang dikepalai seorang Rasul. Tetapi karena zaman Rasul-rasul telah selesai, maka negara terbaik kelas dua ialah negara yang dikepalai oleh seorang filosof<sup>51</sup>, kendati belum pernah menjadi kenyataan dalam sejarah.

Jika kaum idealis sebagaimana digambarkan di atas, cenderung menolak format kenegaraan yang ada, maka kaum realis cenderung menerimanya. Selain itu, tipe formalistik cenderung mementingkan bentuk daripada isi. Pendekatan ini menawarkan konsep tentang negara dengan simbolisme keagamaan, seperti tampak pada model negara Islam atau partai Islam, sementara pendekatan substansivistik, sebaliknya menekankan isi daripada bentuk. Konsepsi tentang negara yang ditawarkan tidak mempersoalkan format dari negara itu, tetapi memusatkan perhatian kepada pemberian seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai agama yang telah disempurnakan dan diperuntukkan bagi umat manusia sepanjang masa, Islam memberikan pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi segala aspek yang diperlukan dalam hidup manusia, yaitu aspek aqidah, ibadah, akhlak dan muamalat. Untuk merealisasikan ajaran Islam yang mencakup aspek-aspek kehidupan itu, kenyataan-kenyataan manusiawi memperoleh perhatian sepenuhnya. Islam yang memberikan pedoman kepada manusia yang bersifat menyeluruh dan menjamin akan mendatangkan kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat serta memberi perhatian kepada kenyataan-kenyataan manusiawi itu pada tempatnyalah apabila dinyatakan sebagai agama rahmat.

---

<sup>50</sup> M. Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam* (Ulumul Quran, No.2, Vol.IV, Tahun 1993), p. 29-30. dan lihat Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), p. 5.

<sup>51</sup> Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1978), p. 104-105.

Oleh karena itu, hubungan agama dan negara dalam pemikiran politik Islam, dapat dikelompokkan dalam tiga paradigma utama. Pertama, mereka memandang bahwa negara adalah lembaga keagamaan dan sekaligus lembaga politik, karena itu kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama sekaligus kekuasaan politik. Kedua, negara oleh mereka dianggap sebagai lembaga keagamaan tetapi mempunyai fungsi politik, karena itu kepala negara mempunyai kekuasaan agama yang berdimensi politik. Ketiga, mereka pun memandang bahwa negara adalah sebagai lembaga politik yang sama sekali terpisah dari agama, kepala negara karenanya hanya mempunyai kekuasaan politik atau penguasa dunia saja.



### Daftar Pustaka

- Abd ar-Raziq, Ali, *Al-Islam wa Usul-al Hukmi*, Kairo: 1925.
- Abdillah, Masykuri, Islam, Negara dan Civil Society, Prospek dan Tantangan Pasca Orde Baru dalam M. Dawam Rahardjo *Mewujudkan Satu Umat*, Jakarta: Puzam, 2002.
- Abduh, Muhammad, Perintis Pembaruan Islam, dalam Ali Rahmena (ed), Ivonne Haddad, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- Ahmad, Z.A., *Konsepsi Negara Islam*, Bandung: N.V. Alma'arif, 1952.
- , *Republik Islam Demokratis*, Tebing Tinggi, tt.
- Ahmed An-Na'im, Abdullahi, *Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan, 2007.
- Akhavi, Shahrugh, *Pemikiran Sosial Syiah dan Praksisnya dalam Sejarah Iran Akhir-akhir ini*, dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (Penyunting) *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Al-Bahy, Muhammad, *Islam dan Sekularisme Antara Cita dan Kenyataan*, Solo: Ramadhani, 1998.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Iqtishad fi Al-I'tiqad*, Mesir: Maktabah Al-Jundi, 1972
- Ali, Fachry, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan, Kebutuhan Demokrasi dalam Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Al-Jashshash, *Abkam Al-Qur'an*, Baitut: Darul Fikr, 1405.
- Al-Maududi. Abul 'Ala, *Khilafah dan Kerajaan*, Penerjemah Muhammad al-Bagir, Bandung: Karisma, 2007
- Al-Qurtubi, *Aljami' li Abkam al-Qur'an*, Kairo: Maktabah Darul Kutub al-Mishriah, 1994.
- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Asad, Muhammad, Pemerintahan dan Azaz-azaznya, dalam Salim Azzam (ed), *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1983.
- Ashaari, Omardin, *Sistem Politik dalam Islam*, Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah, 2008.
- At-Thabari, *Jami'ul Bayan*, Boulak, 1328 H.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996
- Azzam, Salim, *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1983.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam (Sebuah Pengantar Filsafat Politik Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 1981.
- Brown, L. Carl, *Wajah Islam Politik Pergulatan Agama & Negara Sepanjang Sejarah Umat*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Dhiauddin Umari, Akram, *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Donal, P. Little, A New Look al-Ahkam Al-Sultaniyah, *The Muslim Word*, Vol;.64, No.1, 1994.
- Edwards, Beverley Milton, *Islam & Politics*, Cambridge: Polity Press, 2004.
- Effendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Elvandi, Muhammad, *Inilah Politikku*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Esposito, John, L, *Ancaman Islam Mitos Atau Realitas*, Bandung: Mizan, 1994.
- , *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- , *Islam Aktual*, Depok: Inisiasi Press, 2005.
- Garaudy, Roger, *Islam Fundamentalis dan Fundamentalis Lainnya*, Bandung: Pustaka, 1993.

- Haekal, Muhammad Hussain, *Pemerintahan Islam (Terj)*, Jakarta: Pustaka Firdaus 1993
- Hasbi, Artani, *Musyawarah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Ibnu Kholdun, Abd al-Rahman, *Muqaddimah*, Baghdad: Al-Mutsanna, 1967.
- Idris, Ja'far, *Islam dan Perubahan Sosial*, Bandung: Mizan, 1984.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ismael, Y. and Ismael Jacquelines, "Political Hertage of Islam". In Tareq Y. Ismael and Jacquelines Ismael (eds) *Politics and Government in the Middle East and North Africa*, Miami: Florida International University Press, 1991.
- Ka'bah, Rifyal, *Islam dan Fundamentalisme*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Khadiq, Gerakan Politik Umat Islam Indonesia Tiga Era: Revolusi, Orde Lama, dan Orde Baru, dalam M. Damami Zein (editor), *Wacana Politik Islam Kontemporer*, SUKA Press, 2007.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Lewis, Bernard, *Kebangkitan Islam di Mata Seorang Sarjana Barat*, Bandung: Mizan, 1983.
- , *Bahasa Politik Islam*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Linjakumpu, Aini, *Political Islam in the Global World*, Ithaca Press, 2008.
- M. Romli, Asep Syamsul, *Isu-isu Dunia Islam*, Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- Maarif, Syafii, *Islam Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- , *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1993.
- , Politik dalam Perspektif Islam, *Ulumul Quran*, No.2, Vol.IV, Tahun 1993.

- Madaniy, A. Malik, *Politik Berpayung Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Madjid, Nurcholish, Kata Pengantar dalam Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- , Kata Sambutan dalam Munawir Sjadzali; *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Mark Juergensmeyer, *Menentang Negara Sekuler: Kebangkitan Global Nasionalisme Religius*, Bandung: Mizan, 1998.
- Muhammad Said, Hakim, Moralitas Politik Konsep Mengenai Negara, dalam Fathi Osman (ed), *Islam Pilihan Peradaban*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1989.
- Mukti Ali, H.A., *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta: Jambatan, 1994.
- Muqaddas, Djazimah, *Kontribusi Versi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*, Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Nasroen, M., *Asal Mula Negara*, Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1978
- Obert Voll, John, *Politik Islam Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Piscatori, James P., Politik Ideologis di Arab Saudi dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (Penyunting), *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985
- Qadir Hamid, Tijani Abd. *Pemikiran Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Qamaruddin, Khan, *The Political Thought of Ibn Taimiyah*, Islamabad: Islamic Reseach Institute, 1973.
- Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Negara*, Penerjemah Safril Halim, Jakarta: Rabboni Press, 1977.

- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.
- , *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Beirut: Daar Ihya al-Thurats al-Arabi Cet ke V, 1967.
- , *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Penerjemah Aunurrafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Rabbani Press, 2001.
- Rahman, Fauzi dan Miftahuddin, *Upaya Al-Maududi Memurnikan Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1993.
- Rahnema, Ali (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rasyid Ridha, M, *Tafsir Al-Manar*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Sharif, M. *Islamic and Educational Studies*, Lahore: Institute of Islamic Culture, 1964.
- Siddiqui, Kalim, *Seruan-seruan Islam: Tanggung Jawab Sosial dan Kewajiban Menegakkan Syari'at*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Sukarna, *Ideologi: Suatu Studi Ilmu Politik*, Jakarta: Bandung: Alumni, 1981.
- Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2001.
- Suyuthi, J., *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syamsuddin, M. Din, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam, Ulumul Quran*, No.2, Vol. IV, Tahun 1993.
- Tholhah Hasan, Muhammad, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Tim Tarjih Departemen Agama dan Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1991.
- , *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1991.

- Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik (Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan*, Yogyakarta: Sipress, 1994.
- Wach, Joachim, *The Comparative Study of Religion*, Joseph M. Kitagawa (ed), New York and London: Colombia University Press, 1996.
- Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1960.
- Zahrah, M. Abu, *Sejarah Aliran-aliran dalam Islam Bidang Politik dan Aqidah*, Ponorogo: Trimurti, 1991.